

DISAKSIKAN OMBUDSMAN, KANTOR AGRARIA DAN BPN SE KEPRI SIAP BERI PELAYANAN BEBAS PUNGLI

Rabu, 27 Maret 2019 - Agung Setio Apriyanto

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan penandatangan pernyataan untuk komitmen tinggi menerapkan standar pelayanan publik.

" Pernyataan komitmen ini semakin mendorong layanan bidang keagrarian dan pertanahan bebas maladministrasi sehingga masyarakat menerima layanan yang berkualitas, bersih, transparan dan berkeadilan," ucap Lagat Parroha Patar Siadari.

Lagat Parroha Patar Siadari mengharapkan dengan pernyataan komitmen ini para Kepala Kantor Pertanahan agar semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya untuk masyarakat.

Lebih lanjut Lagat Siadari menyampaikan bahwa hal ini merupakan inisiatif Ombudsman sebagai lembaga negara yang ditugasi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sesuai dengan hasil penilaian melalui survei kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Kepulauan Riau, maka ada empat kantor pertanahan dinyatakan telah menerapkan fasilitas standar pelayanan sesuai dengan UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun kantor pertanahan yang dimaksudkan adalah kantor Pertanahan Kota Batam, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjungbalai Karimun, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Keempat kantor yang dinilai tahun 2018 lalu memperoleh nilai yang signifikan sesuai dengan variable dan indikator sehingga masuk dalam zona hijau atau kepatuhan tinggi.

Meskipun keempat kantor ATR/BPN tersebut diatas telah menerapkan standar pelayanan publik namun tidak ada jaminan bahwa pelayanan disana sudah berkualitas, bersih, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. Melalui pernyataan komitmen inilah maka Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau mendorong agar para kepala kantor diingatkan untuk terus meningkat pelayanannya. Harapan Ombudsman agar pameo negatif terhadap layanan BPN berubah menjadi positif.

" Kabarnya kan banyak calo, permainan mafia tanah dan oknum dilingkar kan BPN sehingga layanan disana terkesan sulit dan mahal, semoga dengan komitmen ini semua berubah menjadi lebih baik sesuai ekspektasi masyarakat di Kepri," ujar Lagat.

Lagat menambahkan bahwa Ombudsman dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional sudah menandatangani nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama Tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria, Badan Pertanahan sejak tahun 2011 lalu.

" Keduanya sepakat terus mengintensifkan kerjasama ini untuk mendorong perbaikan pelayanan di seluruh kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia," tutup Lagat.